



## Pengaruh Program Koperasi Amal Srikandi di Kampung Badran dalam Rangka Exit Program CSR PT. Sarihusada

Andaru Sheera Kristianto<sup>1</sup>, Dibina Dzikirullah<sup>2</sup>, Franzeska Sandrina Regita Cahyani<sup>3</sup>, Hafizhah Saraya Putri<sup>4</sup>, Mutiara Izattun Nafishah<sup>5</sup>

Universitas Gadjah Mada, Universitas Mataram

Email: [hafizhahsarayaputri@mail.ugm.ac.id](mailto:hafizhahsarayaputri@mail.ugm.ac.id)

---

Received: 12 November 2023

Revised: 11 Desember 2023

Accepted: 18 Desember 20

---

### ABSTRACT

Poverty is one of the social problems in Indonesia concerned by many parties. Various ways in attempts to solve this problem have been done, one of them is private sector assistance programs in the form of corporate social responsibility, also known as CSR. The presence of the CSR program collaborates with the surrounding communities to achieve the target. CSR program by PT. Sarihusada uses three main business points aligned with five program pillars so that results of activities can remain in line with company goals and CSR targets. Due to the many other social problems besides economic problems, the CSR program "Koperasi Amal Srikandi" is an effort to increase community capacity to be more empowered and able to overcome further problems independently. Thus, all forms of activities carried out great emphasis on the active participation of the local community. This research uses descriptive qualitative methods and interviews conducted with related communities. It is known that the CSR program is carried out by PT. Sarihusada in Badran Village is considering community involvement through the Koperasi Amal Srikandi. Through the Koperasi Amal Srikandi, the implementation of other programs such as *posyandu* and *PAUD* is greatly encouraged in order to implement the programs well.

**Keywords:** Poverty, corporate social responsibility, community development.

### ABSTRAK

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan sosial di Indonesia yang kehadirannya menjadi perhatian banyak pihak. Berbagai upaya dalam menangani permasalahan kemiskinan telah diupayakan, salah satunya dengan program bantuan oleh swasta yang berupa tanggung jawab sosial perusahaan atau juga dikenal dengan CSR. Kehadiran program CSR juga menggandeng keberadaan masyarakat sekitar sebagai salah satu cara untuk mencapai target. Program CSR oleh PT. Sarihusada menggunakan tiga poin utama bisnis yang diselenggarakan lima pilar program sehingga hasil kegiatan dapat tetap sesuai dengan tujuan perusahaan dan target CSR. Didukung oleh banyaknya persoalan sosial lain di samping masalah ekonomi, program CSR Koperasi Amal Srikandi menjadi upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga dapat menjadi lebih berdaya dan mampu mengatasi masalah lanjutan secara mandiri. Untuk itu, segala bentuk aktivitas yang dilaksanakan sangat menekankan pada partisipasi aktif masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat terkait. Diketahui bahwa program CSR yang dilakukan oleh PT. Sarihusada di Kampung Badran mempertimbangkan keterlibatan masyarakat melalui program Koperasi Amal Srikandi. Melalui koperasi ini, jalannya program lain seperti *posyandu* dan *PAUD* sangat terdorong sehingga kedua program tersebut mampu dilaksanakan dengan baik.

**Kata kunci:** Kemiskinan, tanggung jawab sosial perusahaan, pengembangan masyarakat.

©2023 by Andaru Sheera Kristianto, Dibina Dzikirullah, Franzeska Sandrina Regita Cahyani,  
Hafizhah Saraya Putri, Mutiara Izattun Nafishah

Under the licence CC BY-SA 4.0

---

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang tidak lepas dari berbagai permasalahan sosial yang hadir di dalamnya, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Menurut Soetomo (2008), masalah sosial merupakan sebuah kondisi yang tidak diinginkan masyarakat sebab merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan, norma, nilai, dan standar sosial yang berlaku. Suatu kondisi dapat dikelompokkan menjadi masalah sosial jika menimbulkan penderitaan dan kerugian, baik fisik maupun nonfisik. Masalah sosial yang hadir di Indonesia kemudian menjadi kekhawatiran berbagai pihak. Permasalahan sosial yang hingga kini masih lekat dengan masyarakat salah satunya merupakan kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana masyarakat masih mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar sebagai standar hidup minimum (Kuncoro, 2000).

Badan Pusat Statistik pada tahun 2016 menyatakan bahwa acuan dalam indikator kemiskinan di Indonesia ditentukan dengan menggunakan beberapa indikator, yaitu *head count index*, *poverty gap index*, serta *poverty severity index*. *Head count index* menekankan pada jumlah persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Kemudian *poverty gap index* atau lebih dikenal dengan indeks kedalaman kemiskinan merupakan pengukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan atau *poverty severity index* merupakan bentuk gambaran pengeluaran penduduk miskin. Indikator kemiskinan inilah yang menjadi salah satu pengukuran untuk menentukan tingkat kemiskinan masyarakat di Indonesia.

Terdapat tiga pendekatan lain menurut Hardiman dan Midgley (1982: 33) untuk mengukur tingkat kemiskinan, yaitu garis kemiskinan, pengukuran ketimpangan, serta indikator kesejahteraan. Di samping pendekatan yang menampilkan aspek ekonomi sebagai indikator dominan, terdapat pula pendekatan yang memfokuskan pada aspek non-ekonomi. Pendekatan pada aspek non-ekonomi melihat bahwa indikator yang digunakan harus lebih berfokus pada perbaikan kehidupan manusia atau *improvement of human life* serta diperuntukkan oleh seluruh pihak dan lapisan masyarakat (Goulet, 1973: 94)

Dengan hadirnya berbagai variasi pendekatan pada indikator dalam mengukur tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa kemiskinan dapat dilihat dari pandangan secara absolut dan relatif (Soetomo, 2008). Pandangan secara absolut menekankan bahwa tingkat kemiskinan diukur berdasarkan standar tertentu, sehingga dapat disimpulkan jika masyarakat yang berada di bawah garis standar dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Sebaliknya, jika masyarakat hidup di atas garis standar, maka masyarakat tersebut dikategorikan tidak miskin. Kemudian, pandangan secara relatif melihat kemiskinan sebagai hal yang tidak hanya diukur dengan menghadirkan standar yang baku, namun juga ditinjau dari seberapa jauh peningkatan taraf hidup pada masyarakat lapisan terbawah jika dibandingkan dengan lapisan masyarakat lain. Selain perbandingan peningkatan taraf hidup, perbandingan lain yang digunakan adalah kenaikan tuntutan kebutuhan hidup yang berkembang seiring dengan kehidupan masyarakat.

Kemiskinan tidak semata-mata hadir begitu saja dan menjadi permasalahan dalam masyarakat. Terdapat dua pendekatan latar belakang yang menjadi pemicu hadirnya kemiskinan. Pendekatan pertama menitikberatkan sumber masalah pada level individu dengan menggunakan *person blame approach*, dimana menjelaskan bahwa kemiskinan hadir sebagai akibat dari adanya cacat dan kelemahan individual seperti kelemahan fisik, kurangnya intelektual dan keterampilan individu, sifat malas, adopsi budaya kemiskinan, serta rasa *need of achievement* yang rendah (Hardiman and Midgley, 1982: 51). Pendekatan kedua yaitu *system blame approach* yang menitikberatkan penyebab kemiskinan pada level struktur dan sistem. Hal ini dapat dilihat dari kondisi yang menampilkan berbagai jenis ketimpangan, seperti ketimpangan antar kelas, ketimpangan wilayah, ketimpangan jenis kelamin, serta berbagai ketimpangan antar lapisan masyarakat lainnya yang tidak hanya dipengaruhi faktor pendapatan, namun juga kekayaan, pengaruh, dan kekuasaan atau *wealth, prestige, and power* (Hardiman and Midgley, 1982: 47).

Jika kemudian ditelaah dari pendekatan struktur dan sistem atau *system blame approach* sebagai dasar merubah struktur dalam rangka mengentaskan kemiskinan, Kramer (1969: 4) mengemukakan empat bentuk partisipasi. Salah satunya adalah bentuk partisipasi dalam perkembangan program. Partisipasi ini didasari pada

pemikiran bahwa lapisan miskin berkedudukan sebagai konsumen program dan kelompok sasaran, sehingga program yang ditawarkan harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. Pendapat dan saran dari kelompok sasaran tersebut harus didengar dan diperhitungkan agar program dapat berjalan sesuai harapan.

Korten (1986: 2) merumuskan *Community Based Resource Management* dimana pengelolaan sumber daya tidak dilakukan secara terpusat, namun oleh masyarakat yang bersangkutan. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan akan membuat pengelolaan sumber daya lebih sesuai dengan kondisi, kebutuhan, serta masalah yang hadir pada wilayah tersebut. Pendekatan ini menggunakan prinsip bahwa pemegang kontrol dari suatu tindakan haruslah melibatkan individu atau kelompok yang akan menanggung akibat dari adanya tindakan tersebut.

Dalam mendukung keberhasilan *Community Based Resource Management*, diperlukan pula kontribusi berbagai pihak. Salah satu pihak yang berperan dalam keberhasilan *Community Based Resource Management* adalah swasta. Keberadaan pihak swasta dalam pengentasan kemiskinan ini dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, yang juga dikenal dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Kast (2013) mendefinisikan CSR sebagai sebuah program yang dilakukan oleh organisasi sebagai salah satu upaya dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah, seperti masalah pendidikan, kelaparan, kemiskinan, serta lapangan pekerjaan atau pengangguran.

Salah satu bentuk yang kerap kali digunakan oleh sebuah perusahaan dalam menjalankan program CSR kerap kali menggunakan usaha *community development* yang melibatkan masyarakat sekitar. *Community development* hadir jika pengorganisasian masyarakat atau *community organization* berhasil tercapai. *Community organization* merupakan sebuah proses dimana sekelompok masyarakat mampu untuk mendefinisikan berbagai kebutuhan dan menentukan skala prioritas dari kebutuhan-kebutuhan tersebut, serta mengembangkan keyakinan untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan dengan mempertimbangkan

skala prioritas berdasarkan sumber yang terdapat baik dalam kelompok masyarakat itu sendiri maupun faktor penunjang dari luar (Ross Murray, 1967).

Kehadiran *community development* sejatinya mendorong masyarakat untuk dapat bersikap mandiri dalam menghadapi segala permasalahan yang hadir di dalam kelompoknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sebuah program CSR oleh PT. Sarihusada kemudian membentuk masyarakat yang mampu untuk mengakomodasi kebutuhan mereka sendiri melalui adanya pengorganisasian masyarakat yang baik untuk menunjang keberlangsungan program yang telah hadir sebelumnya.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan melakukan penggambaran situasi atau keadaan dari subjek dan objek dalam penelitian.. Menurut Whitney (dalam Nazir, 1988: 63), penelitian deskriptif adalah penelitian untuk pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Proses pencarian fakta Suatu rumusan masalah deskriptif berguna untuk memandu peneliti dalam mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Dalam definisi lain, Sugiyono (2005: 21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian kualitatif ini menyajikan deskripsi berupa gambaran fenomena atau proses kegiatan di masyarakat secara detail dan spesifik.

Proses pencarian fakta dilakukan dengan mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Dalam penelitian yang dilakukan di daerah Kampung Badran, Bumijo, Jetis, Yogyakarta dengan pengkhususan pada Program Koperasi Amal Srikandi sebagai *exit program* dari CSR PT. Sarihusada, peneliti berusaha untuk mengamati realitas sosial yang hadir di Kampung Badran serta kaitannya dengan kegiatan Koperasi Amal Srikandi. Selain mengamati kegiatan masyarakat dan proses berjalannya koperasi, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait dengan Koperasi Amal Srikandi. Wawancara dilakukan

dengan informan yang memiliki peran penting serta pemahaman dan pengalaman dalam proses berdirinya program dan pelaksanaan program CSR Koperasi Amal Srikandi PT. Sarihusada Yogyakarta. Wawancara juga dilakukan dengan masyarakat penerima manfaat atau sasaran program CSR Amal Srikandi. Beberapa informan tersebut diantaranya:

- 1) Bapak Joko selaku Ketua Koperasi Amal Srikandi;
- 2) Ibu Azizah selaku Ketua Posyandu;
- 3) Ibu Rohayati sebagai Kader.

Proses pengumpulan data dalam penelitian juga dilakukan dengan studi literatur. Karya tulis ilmiah, jurnal, dan penelitian dengan tema yang relevan atau berkaitan diambil guna menjadi referensi peneliti dalam penulisan. Analisis studi literatur dalam penelitian ini berguna untuk mengkaji secara kritis suatu ide, teori, atau temuan dalam literatur dengan tujuan akademis. Studi literatur juga berguna dalam memahami beragam definisi serta temuan hasil penelitian dengan topik yang relevan. Tinjauan literatur yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, artikel, buku, dan penelitian lainnya. Berbagai fakta atau temuan yang didapat melalui proses pengumpulan data (observasi, *interview*, studi literatur) dideskripsikan secara sistematis guna menjelaskan informasi yang relevan serta penting berkaitan dengan proses berdiri dan berjalannya Koperasi Amal Srikandi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Koperasi Amal Srikandi bertujuan untuk membuat program CSR yang ada seperti PAUD (Pendidikan) hingga Posyandu (Kesehatan) memiliki keberlanjutan ke depannya. Selain itu, dengan adanya koperasi yang beranggotakan para kader Posyandu dan PAUD ini diharapkan bisa menjadi wadah untuk berkumpul dan berkomunikasi satu sama lain. Dengan adanya koperasi ini para kader juga mengaku menjadi lebih mudah dalam melakukan pinjaman disaat membutuhkan dengan bunga yang rendah pula. Dari segi program PAUD, Koperasi Amal Srikandi terbukti cukup untuk menunjang keberlanjutan program. Koperasi Amal Srikandi membagikan sebagian SHUnya sebesar Rp600.000,00 per tahun kepada PAUD yang digunakan untuk pembelian berbagai macam alat kegiatan belajar mengajar

seperti *puzzle*, plastisin, bahkan juga pemberian makanan berat sebulan sekali kepada anak-anak PAUD. Dana dari Koperasi Amal Srikandi dimanfaatkan pula untuk membiayai keperluan yang mendesak lainnya seperti pelunasan pembelian tanah untuk tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Dari adanya Koperasi Amal Srikandi serta program pelatihan bagi kader melalui kegiatan CSR Rumah Srikandi dapat disimpulkan bahwa kader merasa berjalannya PAUD menjadi semakin baik dan maksimal dari sebelumnya. Terlebih lagi dari segi pendanaan merasa terbantu, karena sama sekali tidak memungut uang dari para orang tua murid. Akan tetapi, berbagai macam pendanaan lainnya seperti uang lelah hingga fotokopi berasal dari dana kegiatan RW.

Program yang terdampak oleh keberadaan Koperasi Amal Srikandi adalah Posyandu. Posyandu sendiri sudah merasa cukup terbantu dalam hal keberlanjutannya karena sebagian SHU juga diberikan untuk masuk ke dalam kas posyandu yang membantu penyediaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) untuk balita mulai dari pembelian nasi, sayur, dan lauk. Penyediaan makanan tambahan untuk balita selain berasal dari kas posyandu yang sebagian diterima dari SHU, juga berasal dari RT yang secara bergilir bergantian untuk memasak. Dimana posyandu hanya mengeluarkan uang sebesar Rp100.000,00 dan jika ada biaya yang lebih dari itu maka RT bertanggung jawab untuk menutup kekurangannya. Hal ini supaya juga ada rasa partisipasi masyarakat untuk bertanggung jawab dalam program Posyandu yang ada.

### **Pembahasan**

Kemiskinan diukur melalui indikator seperti *head count index*, *poverty gap index*, dan *poverty severity index* yang masing-masing memberikan perspektif tentang jumlah, kedalaman, dan keparahan kemiskinan. Penekanan pada kemiskinan absolut versus relatif menunjukkan bahwa tidak ada satu ukuran tunggal yang dapat menangkap realitas kompleks dari kemiskinan. Kemiskinan absolut berfokus pada standar yang ditetapkan untuk menilai kebutuhan dasar, sedangkan kemiskinan relatif mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi yang lebih luas dan bagaimana individu atau kelompok berbanding dengan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini mengakui bahwa penyebab kemiskinan

bisa dilihat dari dua sudut: *person blame approach* yang menyalahkan individu atas kekurangan mereka, dan *system blame approach* yang menyoroti kegagalan struktural dan sistemis yang menciptakan dan mempertahankan ketidaksetaraan. Pendekatan *person blame* sering mengabaikan faktor eksternal yang mempengaruhi kemiskinan, seperti diskriminasi, kebijakan publik yang tidak adil, dan faktor ekonomi makro. Di sisi lain, *system blame approach* mendukung perubahan pada tingkat kebijakan dan struktur sosial untuk mengatasi kemiskinan.

Program Koperasi Amal Srikandi muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan. Program ini menggambarkan bagaimana pemberdayaan komunitas dan manajemen sumber daya yang inklusif dapat mendukung individu dan keluarga dalam mengatasi kemiskinan. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan eksekusi program ini ditekankan sebagai kunci untuk mencapai hasil yang berkelanjutan dan meningkatkan kemandirian. Koperasi Amal Srikandi juga merupakan contoh bagaimana program CSR dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik komunitas, sambil juga membantu mengintegrasikan individu ke dalam ekonomi yang lebih luas. Penekanan pada keterlibatan komunitas dalam pengelolaan dan kepemilikan program menunjukkan pergeseran dari model tradisional CSR yang sering kali top-down menjadi pendekatan yang lebih kolaboratif dan partisipatif.

Koperasi adalah faktor yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pembangunan. Dengan menyatunya kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok, tercapailah tujuan-tujuan yang dikehendaki dan menghasilkan manfaat bagi seluruh anggota (Sartika, 2002). Koperasi digunakan sebagai sarana mengentaskan kemiskinan karena berdasarkan UU Koperasi No. 17 Tahun 2012 tentang nilai yang menjadi landasan kegiatan koperasi adalah menolong diri sendiri dalam arti para anggota berkumpul dan saling membantu membentuk sebuah koperasi (pasal 5 ayat 1).

Bagi beberapa kalangan, koperasi saat ini masih diasumsikan tergolong ke dalam badan usaha kelas dua setelah BUMN dan BUMS. Akan tetapi apabila diamati secara saksama, koperasi memiliki kekuatan dan potensi yang mampu dikembangkan bersama oleh para anggota dalam rangka berkompetisi dengan

pesaing serupa dengan tawaran alternatif lain. Melihat kondisi saat ini yang menegaskan pada semakin besarnya pasar global terutama di kawasan Asia Tenggara dalam konteks perkembangan bisnis, tak dapat dipungkiri semakin sengit pula persaingan bisnis dan kualitas pekerja dan kemudian berdampak pada keberlangsungan aktivitas koperasi.

### **Sejarah Kampung Badran**

Kampung Badran RW 11 merupakan kampung yang berada di Kelurahan Jetis, Kecamatan Bumijo, Kota Yogyakarta. Kampung ini terdiri dari lima RT, yakni RT 47, RT 48, RT 49, RT 50, dan RT 51. Badran adalah salah satu kampung yang berada di sebelah barat kota Yogyakarta dengan batasan langsung Sungai Winongo. Jumlah penduduk dari Kampung ini adalah 1.074 orang dengan 342 kepala keluarga (Trajuningsih, 2015). Kampung ini dahulunya dikenal sebagai Kampung Preman oleh kebanyakan masyarakat di Yogyakarta di era tahun 1970-an. Alasan kampung ini dikenal sebagai Kampung Preman karena dari wilayah ini muncul seorang tokoh preman bernama Gun Jack yang amat terkenal di wilayah kota Yogyakarta. Hal-hal lain yang memicu penyebutan Kampung Badran sebagai Kampung Preman adalah karena dulunya Kampung ini merupakan bekas kuburan cina yang dijadikan sebagai tempat persembunyian para preman sehabis merampok, dan kemudian tumbuh sebagai pemukiman. Keberadaan orang-orang yang menyimpang seperti preman, hingga anak-anak jalanan di Kampung Badran semakin menguatkan stigma Kampung Preman tersebut, bahkan memicu berbagai masalah sosial yang lain seperti perjudian, tindak kekerasan, hingga tindakan anomali lainnya (Rusmiyati, dkk, 2018).

Pada dekade awal tahun 2000-an, di Kampung Badran terdapat banyak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak berkebutuhan khusus (ABK), terlantar, putus sekolah, korban kekerasan, serta anak dengan kondisi kesehatan rendah. Terdapat pula persoalan perdata seperti belum terpenuhinya kepemilikan akta kelahiran karena kurang mendapat perhatian dari pemerintah setempat dan masyarakat. Selain itu di Kampung Badran juga banyak sekali permasalahan lain seperti para perempuan yang terjerat hutang oleh rentenir, maraknya pernikahan dini, hingga kekerasan dalam rumah tangga (Setyowati, 2016).

Mata pencaharian masyarakat kampung Badran sebagian besar merupakan wiraswasta, PNS tingkat rendah, dan karyawan swasta yang tingkat ekonominya tergolong menengah ke bawah. Terdapat berbagai variasi usaha yang dilakukan di kalangan warga Kampung Badran sehingga aktivitas ekonomi mikro di wilayah ini dapat disimpulkan cukup baik. Selain itu, *home industry* yang kerap dilakukan masyarakat Kampung Badran juga dikategorikan sebagai potensi ekonomi menjanjikan. Contoh *home industry* yang digeluti masyarakat sekitar yaitu onde-onde ceplus, produksi bakpia, yangko, serta produk-produk kedelai seperti, tahu, susu kedelai, dan lain-lain. Ada pula kelompok budidaya ikan dengan sistem keramba serta kelompok lain yang tergabung dalam koperasi simpan pinjam. Terlepas dari banyaknya usaha-usaha yang dilakukan masyarakat, nyatanya potensi Kampung Badran belum sepenuhnya dimanfaatkan sehingga produktivitas serta kegiatan ekonomi belum berjalan dengan optimal (Nurjanah, 2018).

### **Awal Hadirnya Program**

Kampung Badran dipilih sebagai penerima manfaat karena wilayah ini merupakan daerah urban atau perkotaan di sepanjang Sungai Winongo yang adalah *black area* di Yogyakarta. Digolongkan sebagai *black area* karena perlu adanya dorongan dan bantuan untuk mengembangkan aspek ekonomi, sosial, dan pendidikan. Dari berbagai permasalahan sosial yang ada di Kampung Badran, muncul inisiatif untuk mengatasinya mulai dari masyarakat hingga kegiatan CSR dari PT. Sarihusada. Oleh karena itu terdapat beberapa model program pemberdayaan masyarakat yang dirancang dan dilaksanakan oleh PT. Sarihusada kepada masyarakat miskin perkotaan di Kampung Badran RW 11 yang tergabung ke dalam program CSR perusahaan.

### **Tahun 2006: PKBM**

Stigma Kampung Preman berdampak pada kesadaran dan peningkatan motivasi penduduk kampung untuk menghilangkan stigma buruk yang ada dengan cara mengubah kampung menuju ke arah yang lebih baik. Kemudian muncul seorang *local hero* yakni Endang Rohjiani yang membentuk adanya PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. PKBM ini merupakan wadah pemberdayaan anak jalanan, hingga kemudian juga mempunyai bimbingan belajar, taman bacaan,

serta tempat belajar bagi para orang tua yang belum bisa membaca. Endang Rohjiani juga merentas forum Lintas Winongo yang memiliki beberapa program seperti bank sampah hingga wadah simpan pinjam (Setyowati, 2016).

Dengan adanya *local leader* yakni Ibu Endang Rohjiani yang bisa memberdayakan serta melihat kapasitas masyarakat sejak tahun 2006, akhirnya muncul aktor lain seperti pemerintah dan juga pihak swasta yakni PT. Sarihusada Generasi Mahardika yang masuk sejak tahun 2009 dalam rangka membangun Badran ke arah yang lebih baik. Pemerintah sendiri masuk ke wilayah Badran dalam rangka membentuk Badran sebagai Kampung Ramah Anak, cara yang dilakukan pemerintah antara lain seperti pemberian dana, pemberian berbagai macam sosialisasi seperti mengenai hak sipil anak, kesehatan reproduksi, bahaya merokok hingga upaya perlindungan anak, dan juga plangisasi hak-hak anak (Rusmiyati, 2018). Sedangkan, PT. Sarihusada masuk ke dalam Kampung Badran dengan membawa berbagai program pemberdayaan masyarakat dari program CSR Rumah Srikandi yang berfokus pada tiga hal antara lain pendidikan (*Child Education Program*) dengan cara meningkatkan kualitas paud, kesehatan (*Nutrition Development Program*) dengan cara meningkatkan kualitas gizi, dan juga ekonomi (*Economic Development Program*) dengan cara pemberdayaan koperasi (Nurjanah, 2018).

#### **Tahun 2009: CSR Rumah Srikandi**

Dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), PT. Sarihusada membentuk program Rumah Srikandi sebagai wujud komitmen perusahaan untuk peduli dengan kesejahteraan, dan kesehatan masyarakat. Rumah Srikandi adalah bentuk implementasi CSR berbasis pemberdayaan masyarakat yang diberikan kepada penduduk yang tinggal di sekitar *Jogja Factory*. Sasaran utama Rumah Srikandi adalah meningkatkan kapasitas kader sosial serta intervensi ke transfigurasi perilaku sehingga masyarakat memiliki pola hidup yang lebih baik.

Sebagian besar masyarakat miskin perkotaan Kampung Badran yang menetap di sekitar bantaran Sungai Winongo menjadi target penerima manfaat program Rumah Srikandi. Rumah Srikandi berdiri pada tahun 2009 yang dalam pertumbuhannya mampu menghasilkan kader-kader seperti kader PAUD dari tiga

orang menjadi 16 orang. Kegiatannya sendiri dilaksanakan sebanyak tiga minggu sekali dan sudah diikuti oleh kurang lebih 60 anak usia dini. Sementara itu Posyandu sebagai kegiatan di bidang kesehatan telah rutin dilaksanakan terlebih dengan program utama mereka yaitu Sadar Gizi dan Balita (Sagita). Begitu pula kegiatan penimbangan balita serta edukasi gizi dan nutrisi seimbang bagi anak teratur dilakukan setiap sebulan sekali. (Rusmiyati, dkk, 2018).

PT. Sarihusada yang melaksanakan program CSR dengan kegiatan yang saling terhubung berlandaskan tiga poin utama yaitu bisnis inti menjadi fasilitator produk bergizi, mendukung program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, dan membuka peluang kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan tiga poin tersebut, terlihat lima pilar yang menjadi pondasi program CSR perusahaan ini, yaitu pendidikan, pemberdayaan ekonomi, gizi dan kesehatan, ibu dan anak, dan preservasi lingkungan serta kepedulian bencana sekaligus kondisi khusus. Masalah utama yang ingin diatasi oleh program ini adalah gizi buruk yang penyelesaiannya dilakukan dengan memperbaiki tingkat kesehatan balita serta ibu hamil. Salah satu yang diwujudkan dari program Rumah Srikandi untuk mengatasi gizi buruk sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat adalah *urban farming*. Program pemberdayaan yaitu *urban farming* ini bekerja sama dengan *Human Initiative* DI Yogyakarta yang berperan sebagai pendamping program. Terdapat tiga jenis kegiatan yang dilakukan dalam program ini, yakni *urban farming*, pendampingan dan penyuluhan posyandu, serta PAUD. Program *urban farming* sendiri diupayakan sebagai penguatan ketahanan pangan masyarakat dengan memanfaatkan lahan yang tersedia untuk memproduksi sayuran sehingga dapat menjadi cadangan sumber gizi bagi keluarga dan masyarakat. Selain untuk konsumsi pribadi, hasil sayuran yang ditanam dapat dijual sehingga dapat menopang perekonomian masyarakat.

Secara lebih rinci, program-program yang dilaksanakan oleh Rumah Srikandi yaitu membina serta mendidik ibu-ibu untuk menjadi kader gizi di Kampung Badran seperti penyuluhan tentang asi eksklusif bagi ibu hamil, kesulitan makan yang terjadi pada anak-anak, dan gangguan kesehatan akibat kurang gizi; pengembangan fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD; mengadakan

pelatihan keterampilan bagi ibu-ibu kader untuk dapat meningkatkan kemandirian berjalannya Rumah Srikandi dan masyarakat setempat (Saraswati, 2021). Di sisi lain, untuk memberdayakan sektor ekonomi masyarakat Kampung Badran, diadakan pelatihan keterampilan membatik, kreasi kerajinan daur ulang, pelatihan membuat kue, dan bentuk-bentuk kerajinan lainnya. Rumah Srikandi bahkan turut membantu membuka peluang pemasaran untuk hasil-hasil pelatihan yang dilakukan para warga.

Rumah Srikandi yang merupakan program tanggung jawab perusahaan atau CSR milik PT. Sarihusada Generasi Mahardika juga bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah yaitu Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Kampung Badran khususnya di RW 11 serta membangun berbagai aspek yang berpotensi. Target dari program-program CSR Rumah Srikandi yaitu:

- a) Pembentukan wadah pendidikan formal bagi anak-anak usia dini dengan kualitas baik
- b) Meningkatkan kesadaran gizi baik bagi para orang tua di tingkat keluarga
- c) Menjalankan program ekonomi, kesehatan, dan pendidikan secara optimal
- d) Meningkatkan kemandirian masyarakat Kampung Badran terutama RW 11 dalam mengelola program-program Rumah Srikandi.
- e) Terbentuknya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau koperasi yang menjadi penopang geraknya perekonomian masyarakat.
- f) Peningkatan tingkat perekonomian warga Kampung Badran RW 11.

### **Rumah Srikandi**

Di bidang ekonomi mikro, pemberdayaan masyarakat melalui program CSR Rumah Srikandi berfokus pada penguatan kapasitas warga dalam mengelola koperasi ataupun lembaga keuangan mikro lainnya yang tidak berlanjut karena kekurangan dana serta tidak adanya pendampingan secara intensif sehingga masyarakat tidak mampu mengembangkan potensinya secara optimal. Selain untuk penguatan kapasitas, program ini dikembangkan untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat sekitar dengan harapan adanya Koperasi Amal Srikandi dapat membantu mengembangkan potensi serta mendukung usaha lokal yang dilakukan

masyarakat Kampung Badran. Oleh karena itu, koperasi turut mengambil andil dalam perkembangan perekonomian masyarakat Kampung Badran.

Setelah beberapa saat program-program Rumah Srikandi dijalankan, dilakukan prosesi serah terima program karena masyarakat dirasa sudah mampu menjalankan program secara mandiri. Haryadi Suyuti yang merupakan Walikota Yogyakarta meresmikan program dan acara serah terima di Kampung Badran kepada masyarakat. Prosesi serah terima program menjadi indikator yang menunjukkan keberhasilan kerja sama antara PKPU dengan PT. Sarihusada dalam memberdayakan masyarakat Kampung Badran melalui program CSR Rumah Srikandi sebagai upaya perusahaan membantu membangun kemandirian masyarakat. Adanya serah terima program-program Rumah Srikandi diharapkan tidak menjadi stagnan melainkan mampu terus mendorong kebebasan, kemajuan, dan kreativitas bagi kegiatan komunitas masyarakat Kampung Badran. Harapan tersebut bertujuan agar perkembangan program dapat menjawab persoalan masyarakat dengan lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat sendiri, terlihat bahwa terdapat perubahan dalam pola hidup masyarakat seperti masyarakat dinilai semakin aktif dan produktif yang terbukti dari berkembangnya kegiatan posyandu dan PAUD serta antusias masyarakat dalam mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Masyarakat produktif tidak hanya dari kalangan muda atau angkatan kerja, tetapi juga ibu-ibu lanjut usia pun ikut aktif berpartisipasi dalam produktif seperti contoh membuat besek, kerajinan sulam, produksi kerajinan tas, dan sebagainya.

#### **Tahun 2014: Koperasi Amal Srikandi (Sejarah Adanya Koperasi Amal Srikandi)**

Salah satu program CSR Rumah Srikandi di bidang ekonomi adalah Koperasi Amal Srikandi. Koperasi menjadi pondasi utama jalannya perekonomian Indonesia dengan memihak pada kondisi masyarakat yang adil dan makmur. Untuk itu koperasi perlu terus dikembangkan sesuai dengan pergerakan atau dinamika perubahan ekonomi agar manfaat yang diberikan dapat terus diterima para anggotanya secara menyeluruh. Maka dari itu koperasi diharapkan mampu membentuk hubungan kerja sama dengan pihak lain atau menyediakan sarana yang

sekiranya mampu menjadi wadah bagi masyarakat untuk menggunakan potensi mereka secara optimal, sehingga peran koperasi sangat penting bagi pembangunan masyarakat.

Koperasi Amal Srikandi sendiri merupakan bentuk *exit program* yang menunjang keberlanjutan dari CSR Rumah Srikandi. Adanya Koperasi Amal Srikandi diusulkan oleh Bapak Joko Sularno yang saat itu merupakan ketua RW dari Kampung Badran RW 11. Terbentuknya koperasi ini bertujuan untuk menjadi ‘payung’ yang menghimpun koperasi-koperasi lain di Desa Badran. Terdapat beberapa koperasi yang telah berdiri sebelum Koperasi Amal Srikandi, tetapi belum ada wadah pusat yang menjadi penghimpun sehingga menciptakan bagan serta kelembagaan yang jelas bagi koperasi-koperasi tersebut. Koperasi ini juga bekerja sama dengan badan hukum yang nantinya ikut berperan dalam mendorong kegiatan produktif masyarakat sekitar contohnya seperti produksi kerajinan batik. Maka dari itu, dengan berdirinya Koperasi Amal Srikandi, kegiatan usaha serta perekonomian masyarakat Badran berkembang dan mengalami kemajuan.

Koperasi Amal Srikandi menaungi kader-kader yang bergerak di kedua program CSR Rumah Srikandi sebelumnya yakni Posyandu ataupun PAUD, baik sebagai guru hingga pengurus lainnya. Selain itu dengan adanya Koperasi Amal Srikandi diharapkan bahwa program CSR sebelumnya yakni PAUD dan juga Posyandu dapat berkesinambungan. Karena perannya sebagai penunjang keberlanjutan dari CSR Rumah Srikandi, Koperasi ini menyisihkan sebagian SHU atau Sisa Hasil Usahanya untuk kemudian membeli alat belajar bagi PAUD serta kebutuhan gizi bagi program Posyandu. Adanya Koperasi Amal Srikandi juga berperan untuk mensejahterakan para kader posyandu dan PAUD yang menjadi anggota dari koperasi ini. Setelah berbagai program berhasil dilaksanakan, diselenggarakan pula evaluasi Rumah Srikandi setiap 3 bulan sekali. Evaluasi ini dihadiri oleh PKPU, perangkat desa, ibu-ibu PKK, serta warga sekitar. Diadakan juga evaluasi antara PKPU dengan PT. Sarihusada setiap satu semester untuk meninjau keberhasilan dan keberlanjutan program-program yang ada berdasarkan indikator.

### **Pengaruh Dari Adanya Koperasi Amal Srikandi**

Dari analisis hasil wawancara yang didapat serta juga observasi yang dilakukan keberadaan Koperasi Amal Srikandi memiliki pengaruh yang positif bagi keberlangsungan program CSR Rumah Srikandi terutama dalam hal pendanaan. Para kader terlihat mampu memanfaatkan koperasi sebagai wadah untuk saling berkomunikasi dan berkumpul setiap sebulan sekali di tanggal 25. Para kader juga dapat menjadikan koperasi sebagai tempat untuk menunjang kesejahteraannya karena melalui koperasi, pinjaman uang yang diberikan memiliki bunga rendah. Selain itu, Koperasi Amal Srikandi juga dapat menjaga keberlanjutan dari program PAUD dan juga Posyandu mulai dari memastikan adanya dana untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita, pemberian alat tulis untuk PAUD, pelunasan tanah untuk PAUD, pembelian makanan untuk PAUD, dan keperluan mendesak lainnya. Walaupun dana untuk PAUD dan posyandu tidak hanya berasal dari sebagian SHU Koperasi Amal Srikandi, melainkan ada dana yang berasal dari kegiatan RW hingga dari RT yang juga membantu pelaksanaan PAUD dan Posyandu, namun dapat disimpulkan bahwa sebagian SHU dari koperasi yang diberikan ke kas posyandu maupun PAUD dapat membantu biaya operasional dengan baik.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung Badran RW 11 melalui Rumah Srikandi. salah satu faktor dominan terkait pelaksanaan program CSR yaitu dukungan positif pemerintah kota terlebih perangkat setempat serta partisipasi proaktif dari masyarakat penerima manfaat. Selain itu didapatkan pula dukungan dalam wujud *supporting management* dari PT. Sarihusada Generasi Mahardika untuk bekerja sama dengan pihak lain serta mengurus pembiayaan program. Ketiga hal tersebut termasuk ke dalam faktor *human capital* yang mendorong tercapainya tujuan program Rumah Srikandi. Akan tetapi, faktor *human capital* ini juga menyebabkan hambatan bagi jalannya program Rumah Srikandi seperti masih adanya pandangan bahwa program CSR ini hanya bersifat *charity* yang sebatas memberikan bantuan langsung berupa barang atau uang. Pada kenyataannya pola pikir seperti ini berpotensi menjadi penghambat berjalannya program

pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dengan orientasi jangka panjang dengan tujuan agar masyarakat Kampung Badran RW 11 dapat lebih mandiri dan mampu berperan aktif dalam membangun dan mengembangkan sumber daya secara berkelanjutan.

## **SIMPULAN**

Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensi untuk pemahaman dan penanganannya. Indikator kemiskinan yang beragam menunjukkan kebutuhan akan strategi yang menyeluruh, yang tidak hanya mengukur kekurangan ekonomi tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan budaya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian meliputi metode deskriptif kualitatif yang menggali kondisi sosial Kampung Badran di Yogyakarta, tempat yang pernah memiliki stigma negatif dan beragam masalah sosial. Program Koperasi Amal Srikandi sebagai bagian dari CSR PT. Sarihusada berhasil menjadi contoh bagaimana pemberdayaan masyarakat dapat membantu mengatasi kemiskinan dengan mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sumber daya mereka sendiri. Dukungan dari pemerintah dan keterlibatan aktif masyarakat sangat penting dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program pemberdayaan. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dalam mengentaskan kemiskinan, dengan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hendar, J. (2013b). Pelaksanaan Pertanggungjawaban sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) PT. Sari Husada cabang Yogyakarta terhadap lingkungan sosial. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.14421/sh.v2i2.1938>
- Nurjanah, A. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat Urban (Miskin Perkotaan) PT Sari Husada Yogyakarta Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) Rumah Srikandi*. Bantul: UMY <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/1392>
- Nurlaili, E.I., & Cahyono, H. (2014). OPTIMALISASI PERAN KOPERASI SEBAGAI WADAH USAHA BERSAMA MENGENTASKAN KEMISKINAN. <https://doi.org/10.26740/jupe.v2n3.p%25p>

- RESPATI, H. N. R. (2017). *PENERAPAN PROGRAM CSR PT. SARI HUSADA MELALUI KEMITRAAN DENGAN PKPU DI KAMPUNG BADRAN RW. 11* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/28863>
- Rusmiyati, C., & Hikmawati, E. (2018). Implementasi Program Kampung Ramah Anak: dari Kampung Hitam Menuju Layak Anak. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(2), 165-178. <https://doi.org/10.31105/jpks.v17i2.1435>
- Saraswati, P. (2021). PROGRAM RUMAH SRIKANDI SEBAGAI PROGRAM CSR PT. SARIHUSADA (Studi Kasus: Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Logede Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten). *Jurnal Socia Akademika*, 7(2), 122-127.
- Setyowati, Y. (2016). Tindakan Komunikatif Masyarakat “kampung preman” dalam proses pemberdayaan. *Jurnal Aspikom*, 3(1), 16-32. <http://dx.doi.org/10.24329/aspikom.v3i1.96>
- Suara Merdeka.com. (2014). Sarihusada Luncurkan Rumah Srikandi Di Jogja. <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-0489202/sarihusada-luncurkan-rumah-srikandi-di-jogja>
- Sugiono Wirawan, S. E., & Rofiaty, S. E. (2012). Penilaian Masyarakat terhadap Corporate Social Responsibility pada PT. Sari Husada Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(1).
- Trajuningsih, T. D. (2015). Perubahan Sistem Pengelolaan Sampah sebagai Dampak Perubahan Modal Sosial (Studi Kasus Kampung Badran RW 11 Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis Yogyakarta). *Skripsi*. Surakarta:UNS
- Warta.Jogjakota.go.id. (2014). Mendorong Kemandirian Dan Potensi Masyarakat Lewat Program Rumah Srikandi. <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/3801>